

BAB V

KESIMPULAN

Melalui uraian pembahasan pada bab-bab sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa Prancis merupakan salah satu negara maju dunia yang memiliki karakter politik-pemerintahan yang relatif stabil dan secara konsisten berupaya mengedepankan sistem politik-pemerintahan yang demokratis yang mapan melalui pengalaman sejarah yang panjang. Perkembangan politik luar negeri Prancis menghadapi dinamika yang menarik pada periode 2012-2016, politik luar negeri Prancis dihadapkan pada konflik Israel-Palestina. Pada dasarnya konflik ini merupakan persoalan klasik yang telah ada sejak dekade 1950-hingga 1960-an, namun hingga akhir tahun 2016 penyelesaian konflik masih belum dapat tercapai secara mendasar akibat kompleksnya persoalan yang terjadi, termasuk adanya kepentingan dan intervensi asing dalam konflik di kawasan Timur-Tengah.

Prancis telah memulai intervensinya sejak tahun 1993 pasca Perjanjian Oslo, kemudian dapat dilihat dari transformasi kepemimpinan dari era pemerintahan Nicolas Sarkozy ke era pemerintahan Francois Hollande. Dimana politik luar negeri Prancis berkembang pada kedua rezim tersebut dan semakin impresif melalui tindakan-tindakan politik luar negeri yang dapat dilihat oleh masyarakat internasional secara nyata dan menjadi perhatian internasional sehingga memunculkan berbagai intervensi yang menimbulkan dampak positif dan negatif.

Sebagai tolak ukur Prancis berperan sebagai mediator dalam konflik Israel Palestina dibawah pemerintahan Francois Hollande dengan melihat jumlah pertemuan, inisiatif dalam Middle East Peace serta melakukan kunjungan baik

Prancis sebagai salah satu bagian dari United Nation, European Union, atau sebagai negara Prancis sendiri. Selain itu adanya faktor pendukung inisiatif Prancis terutama dalam aspek ekonomi dan militer. Dengan penyelesaian konflik Israel-Palestina maka berbagai perusahaan dan investasi Prancis akan lebih mudah masuk ke negara-negara Arab. Sedangkan pada bidang militer, keterlibatan Prancis ini adalah sebagai wujud *show of force* dalam memperkenalkan Prancis sebagai *arms sales nations* yang nantinya dapat memberikan keuntungan bagi Prancis.

Sedangkan kebijakan Luar Negeri Prancis melakukan inisiatif dalam *Middle East Peace*. Konferensi pertama yang diadakan di Paris pada tanggal 03 Juni 2016, dan yang kedua pada 15 Januari 2017. Pada konferensi kedua, memiliki tujuan untuk menegaskan kembali dukungan mereka terhadap resolusi konflik Israel-Palestina yang adil dan komprehensif. Kemudian menegaskan kembali bahwa solusi yang di negosiasikan dengan dua negara, Israel dan Palestina, yang hidup berdampingan dalam kedamaian dan keamanan, adalah satu-satunya cara untuk mencapai perdamaian yang abadi.

Melalui penelitian penulis dapat menarik kesimpulan bahwa persoalan konflik antara Israel dan Palestina tidak hanya dapat dipandang sebagai konflik antar negara (*bilateral conflict*), namun saat ini telah berkembang menjadi Isu Internasional. Untuk itu, kedepan diperlukan sebuah rezim internasional yang mengatur rekonsiliasi konflik Israel-Palestina secara permanen, khususnya dari negara-negara pemegang hak veto sehingga penyelesaian konflik lebih mudah tercapai dengan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan. Selain itu juga diperlukan penelitian lebih lanjut sebagai temuan akademik sekaligus sebagai *learning point*

bahwa konflik Israel-Palestina yang telah terjadi dalam kurun waktu yang lama dan telah menjadi sejarah peradaban moderen perlu untuk diteliti lebih lanjut hingga terjadi perdamaian diantara Israel dan Palestina.